



Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam dan Interdisipliner

Volume 6 No 2 (Oktober 2021): 227-239

ISSN (Print): [2541-3430](#), ISSN (Online): 2541-3449

Website: <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj>

DOI: 10.30603/jiaj.v6i2.1287

Peran Komite Madrasah sebagai *Advisory Agency* Kebijakan Mutu Akademik di Madrasah Berprestasi Nasional pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Kediri

Mu'awanah, Nurul Ahsin

(Institut Agama Islam Negeri Kediri)

muawanahahmad68@gmail.com, ahsin.stainkediri@gmail.com

The Role of the Madrasah Committee as an Advisory Agency for Academic Quality Policy at Madrasah with National Achievements at Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kediri City

Abstract

Madrasah Tsanawiyah Negeri (State Islamic Junior High School) 2 Kediri City is a national achieving madrasa that has won various achievements at national and international levels in academics, research by Scientific Youth, and institutions. National achievements were also achieved with the achievement of awards in the field of inspirational madrasah leadership, and madrasahs with national integrity. In this study, a qualitative approach was used during the research process with a case study design. Participant observation and in-depth interviews and documentation studies were applied during data collection. This study shows that the achievement of the academic and non-academic quality of this madrasah cannot be separated from the role of the madrasah committee in providing considerations during the planning, implementation, and monitoring process of the quality of Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kediri. The synergistic cooperation between the government, the madrasa academic community, and the madrasa

committee resulted in the achievement of the quality of the madrasa at a national level.

Keywords: Madrasah Committee, Advisory Agency, Academic Quality

Abstrak

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Kediri merupakan madrasah berprestasi nasional yang meraih berbagai prestasi tingkat nasional dan internasional dalam bidang akademik, riset karya Ilmiah Remaja, dan kelembagaan. Prestasi nasional juga diraih dengan capaian penghargaan dalam bidang kepemimpinan kepala madrasah inspiratif, dan madrasah berintegritas tingkat nasional. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif digunakan selama proses penelitian dengan rancangan studi kasus. Observasi partisipan dan wawancara mendalam serta studi dokumentasi diterapkan selama pengumpulan data. Penelitian ini menunjukkan bahwa capaian mutu akademik dan non akademik madrasah ini tidak terlepas dari peran serta komite madrasah dalam memberikan pertimbangan selama proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring mutu Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Kediri. Kerja sama secara sinergi antara pemerintah, sivitas akademika madrasah, dan komite madrasah menghasilkan capain mutu madrasah tersebut bertaraf Nasional.

Kata kunci: Komite Madrasah, Advisory Agency, Mutu Akademik

Pendahuluan

Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.¹

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan diwakili komite sekolah/madrasah. Partisipasi komite sekolah dalam mengawal kebijaksanaan pendidikan adalah keikutsertaan komite sekolah yang mewakili masyarakat dalam memberikan gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2012 tentang acuan pembentukan komite sekolah/madrasah, maka komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan

¹ Pasal 8 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

pendidikan di satuan pendidikan. Dari uraian di atas bahwa peran komite sekolah sebagai mediator, dan komunikator antara *stake holder*, wali murid, dan masyarakat dengan pihak satuan pendidikan sekolah sehingga perannya sangat urgen dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.²

Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana. dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Komite sekolah/madrasah sebagai komunikator antara sekolah dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik dan non akademik sekolah. Husen mengemukakan bahwa “sekolah adalah bagian integral dari masyarakat, keberlangsungan hidup sekolah sangat dipengaruhi peran masyarakat. Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi, keduanya saling membutuhkan.”³

Komite madrasah di MTsN 2 Kota Kediri terdiri dari akademisi, pakar pendidikan, tokoh masyarakat dan unsur perwakilan wali murid. MTsN 2 Kota Kediri adalah madrasah berprestasi nasional yang meraih berbagai prestasi tingkat nasional dan internasional dalam bidang akademik, riset (Karya Ilmiah Remaja/KIR), dan kelembagaan. Prestasi nasional juga diraih dengan capaian penghargaan dalam bidang kepemimpinan kepala madrasah inspiratif, dan madrasah berintegritas tingkat nasional.

Madrasah berprestasi nasional ini memiliki motto *‘we are difference, we are excellenc.’* Visi MTsN 2 Kota Kediri ini adalah Islami, Terampil, Inovatif, Kompetitif, Amanah di singkat ISTIKOMAH.⁴ Dipilihnya MTsN 2 Kota Kediri Kediri sebagai *setting* penelitian ini dengan pertimbangan sekolah ini memiliki keunikan karakteristik antara lain:

1. Mengintegrasikan tradisi akademik dan tradisi pesantren dengan mengembangkan *Boarding School* bagi siswa program Religion Class Program (RCP) dan siswa program akselerasi/Cerdas Bakat Istimewa (CBI).
2. Memiliki standar mutu tinggi sehingga mayoritas alumni MTsN 2 Kota Kediri di terima di SMA/MAN favorit seperti MAN Insan Cendekia, SMA Taruna Nusantara Magelang, SMA 2 Kota Kediri, SMA 1 Kota Kediri, MAN 3 Malang, MAN 2 Kota Kediri.
3. Mengembangkan mutu dan budaya akademik dan non kademik yang tinggi sehingga diperoleh prestasi tingkat nasional dan internasional.

² Permendiknas No 44 Tahun 2012 tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah.

³ Torton Husen, Masyarakat Belajar, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2, Hal. 264-268. (Jakarta: Pusat AntarUniversitas, 2017)

⁴ Dokumen MTsN 2 Kota Kediri, September 2018.

Peran dan Fungsi Komite Sekolah/Madrasah dalam Pengembangan Mutu Sekolah/Madrasah

Komite sebagai lembaga independen mitra sekolah/madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan memiliki peran strategis. Peran komite sekolah/madrasah adalah 1) pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan masing-masing, 2) pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, 3) pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, 4) mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.⁵

Sementara itu, fungsi komite sekolah adalah: a) mendorong timbulnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, b) melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, c) menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat, d) memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: i) kebijakan dan program pendidikan, ii) rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), iii) kriteria kinerja satuan pendidikan, iv) kriteria tenaga pendidikan, v) kriteria fasilitas pendidikan, vi) hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan; e) mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan, f) menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, g) melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.⁶

Komite Sekolah/Madrasah sebagai Representasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Mutu Pendidikan

Komite sekolah/madrasah pada prinsipnya merupakan wakil masyarakat dalam membantu sekolah/madrasah. Peran masyarakat dalam pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:⁷ (1) Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan baik dilembagakan maupun tidak dilembagakan; (2) Lembaga-lembaga masyarakat atau kelompok sosial masyarakat baik

⁵ Kep.Mendiknas No 44 tahun 2012 tentang Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah

⁶ Ibid.

⁷ Umar Tirtarahardja dan S.L.La Sulo, *Pengantar Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta,2005), 179.

langsung maupun tidak langsung mempunyai peranan dan fungsi edukatif; (3) Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun tidak dirancang dan dimanfaatkan.

Adapun hubungan sekolah dengan masyarakat sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan:⁸

1. Kualitas pembelajaran.

Kualitas lulusan sekolah dalam aspek kognitif, efektif, maupun psikomotor hanya akan dapat tercipta melalui proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Proses pembelajaran yang berkualitas akan dapat di capai apabila didukung oleh berbagai pihak termasuk orangtua murid atau masyarakat.

2. Kualitas hasil belajar siswa.

Kualitas belajar siswa akan tercapai apabila terjadi kebersamaan persepsi dan tindakan antara sekolah, masyarakat dan orangtua siswa. Kebersamaan ini terutama dalam memberikan arahan, bimbingan dan pengawasan pada anak atau murid dalam belajar, karena itu peningkatan kemitraan sekolah dengan orangtua murid dan masyarakat merupakan prasyarat yang tidak dapat ditinggalkan dalam konteks peningkatan mutu hasil belajar.

3. Kualitas pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta kualitas masyarakat (orangtua murid) itu sendiri.

Kualitas masyarakat akan dapat dibangun melalui proses pendidikan dan hasil pendidikan yang handal. Lulusan yang berkualitas merupakan modal utama dalam membangun kualitas masyarakat di masa depan.

Hubungan Sekolah/Madrasah dengan Masyarakat

Masyarakat (lebih khusus lagi orangtua murid) mengirimkan anak-anaknya ke sekolah agar mereka dapat menjadi manusia dewasa yang bermanfaat bagi kehidupannya bagi masyarakat secara umum. Secara praktis seringkali kita, para orangtua, menginginkan anaknya dapat berprestasi di sekolah. Ini berarti kebutuhan masyarakat terhadap sekolah adalah penyelenggaraan dan pelayanan proses belajar mengajar dengan output yang berkualitas pula.

Pengertian di atas memberikan isyarat kepada kita bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat lebih banyak menekankan pada pemenuhan akan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan sekolah. Di sisi lain pengertian tersebut diatas menggambarkan bahwa pelaksanaan hubungan masyarakat tidak menunggu adanya masyarakat, tetapi sekolah berusaha secara aktif (jemput bola) serta mengambil inisiatif untuk melakukan berbagai aktivitas agar tercipta hubungan dan kerjasama harmonis.

⁸ I Putu Suwarnaya, *Manajemen Pendidikan* (Malang : Gunung Samudera, 2010), 57.

Definisi yang lebih lengkap diungkapkan oleh Bernays seperti dikutip oleh Suryansyah, yang menyatakan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat adalah:⁹

- 1) Memberikan informasi secara jelas dan lengkap kepada masyarakat.
- 2) Melakukan persuasi kepada masyarakat dalam rangka merubah sikap dan tindakan yang perlu mereka lakukan terhadap sekolah.
- 3) Suatu upaya untuk menyatukan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara timbal balik yaitu dari sekolah ke masyarakat dan dari masyarakat ke sekolah.

Pengertian diatas memberikan gambaran kepada kita apa sebenarnya hakikat hubungan sekolah dengan masyarakat. Hal terpenting dari pengertian di atas adalah adanya informasi yang diberikan kepada masyarakat yang dampaknya dapat merubah sikap dan tindakan masyarakat terhadap pendidikan serta masyarakat memberikan sesuatu untuk perbaikan pendidikan. Sehingga bukan hal yang asing, bila kita seringkali mendengar semboyan ini: Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat.

Dasar Keterlibatan Masyarakat dalam Pendidikan

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dengan dasar pada kata-kata bijak itu, maka perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi beban bersama orang tua, masyarakat dan pemerintah. Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan beberapa peran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, diantaranya adalah :

a. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pada pasal 8 UUSPN disebutkan bahwa "masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Sedangkan Pasal 9 menyebutkan bahwa masyarakat berkewajib memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan."¹⁰

b. Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan diatur dalam pasal 54 UUSPN

- 1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- 2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan.¹¹

⁹ Ibid.

¹⁰ *Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS* (Bandung: Citra Umbara, 2010), 8.

¹¹ Ibid., 28.

Secara lebih spesifik, pada pasal 56 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa di masyarakat ada dewan pendidikan dan komite sekolah atau komite madrasah, yang berperan:¹²

- 1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah atau madrasah.
- 2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/ kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- 3) Komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana. dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan

Partisipasi masyarakat yang telah diwakili komite sekolah merupakan suatu term yang menunjuk kepada adanya keikutsertaan secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi komite sekolah dalam mengawal kebijaksanaan pendidikan adalah keikutsertaan komite sekolah yang mewakili masyarakat dalam memberikan gagasan, kritik membangun, dukungan dan pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan.¹³

Upaya-upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan

Setiap kebijaksanaan pendidikan yang digulirkan oleh pembuat dan pelaksana kebijaksanaan, umumnya mendapat respons dari masyarakat. Meskipun mungkin suatu kebijaksanaan tidak didukung oleh sebagian masyarakat, tetapi haruslah disadari bahwa sebagian masyarakat yang lainnya pasti ada yang mendukung. Heterogenitas masyarakat memungkinkan hal tersebut. Pastia ada di antara lapisan masyarakat yang mau berpartisipasi dalam kebijaksanaan yang dibuat, seberapapun partisipasinya dan sekedar apapun partisipasinya. Meskipun mungkin pembuat dan pelaksana kebijaksanaan tersebut tidak mengupayakan sama sekali partisipasi masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.¹⁴

¹² Ibid., 29.

¹³ Sulaiman Ibrahim, Pendidikan tentang Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari*, Vol. 2, No. 2, 2017, h. 145-148.

¹⁴ Suwarnaya, *Manajemen.*, 82-83.

- a. Menawarkan sanksi atas masyarakat yang tidak mau berpartisipasi. Sanksi demikian, dapat berupa hukuman, denda dan kerugian-kerugian yang harus diderita oleh si pelanggar.
- b. Menawarkan hadiah kepada mereka yang mau berpartisipasi. Tentu hadiah demikian, berdasarkan kuantitas dan tingkatan atau derajat partisipasinya.
- c. Melakukan persuasi kepada masyarakat, bahwa dengan keikutsertaan masyarakat dalam kebijaksanaan yang dilaksanakan, justru akan menguntungkan masyarakat sendiri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- d. Menghimbau masyarakat untuk turut berpartisipasi melalui serangkaian kegiatan.
- e. Mengaitkan partisipasi masyarakat dengan layanan birokrasi yang lebih baik.
- f. Mennggunakan tokoh-tokoh kunci masyarakat yang mempunyai khalayak banyak untuk ikut serta dalam kebijaksanaan, agar masyarakat kebanyakan yang menjadi pengikutnya juga sekaligus ikut serta dalam kebijaksanaan yang diimplementasikan.
- g. Mengaitkan keikutsertaan masyarakat dalam implementasi kebijaksanaan dalam kepentingan mereka. Masyarakat memang perlu diyakinkan, bahwa ada banyak kepentingan mereka yang terlayani dengan baik, jika mereka berpartisipasi dalam kebijaksanaan.
- h. Menyadarkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi terhadap kebijaksanaan yang telah ditetapkan secara sah. Dan kebijaksanaan yang sah tersebut, adalah salah satu dari wujud pelaksanaan dan perwujudan aspirasi masyarakat.

Sekolah/Madrasah perlu melakukan beberapa aktivitas dalam melaksanakan manajemen peran serta masyarakat dan memberdayakan masyarakat dan juga stakeholders lainnya agar dapat mencapai hasil yang diharapkan. Beberapa aktivitas tersebut adalah selalu memberikan penjelasan secara periodik kepada masyarakat tentang program-program pendidikan di madrasah, masalah-masalah yang dihadapi dan kemajuan-kemajuan yang dapat dicapai oleh madrasah (berfungsi sebagai akuntabilitas). Agar pemahaman program oleh masyarakat menyentuh hal yang mendasar, maka harus dimulai dengan penjelasan tentang Visi dan Misi serta tujuan madrasah secara keseluruhan.

Apabila penjelasan-penjelasan tersebut dipahami masyarakat dan apa yang diinginkan serta program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka penghargaan mereka terhadap madrasah akan tumbuh. Tumbuhnya penghargaan inilah yang akan mendorong adanya dukungan dan bantuan mereka pada madrasah. Dengan demikian maka program sekolah harus seiring dengan kebutuhan masyarakat. Karena memang pelangan dan

pengguna hasil lulusan madrasah adalah masyarakat. Atau dengan kata lain pelanggan sekolah itu pada hakekatnya adalah siswa dan orang tua siswa serta masyarakat. Karena itu kebutuhan dan kepuasan pelanggan merupakan hal pokok yang harus diperhatikan oleh lembaga madrasah.

Di samping manfaat seperti diuraikan di atas, upaya peningkatan partisipasi masyarakat dengan madrasah bila dilakukan dengan baik akan memberikan manfaat lain seperti:

- 1) Masyarakat/orang tua murid dan stakeholders lainnya akan mengerti dengan jelas tentang Visi, misi, tujuan dan program kerja sekolah, kemajuan sekolah beserta masalah-masalah yang dihadapi sekolah secara lengkap, jelas dan akurat.
- 2) Masyarakat/orang tua murid dan stakeholders lainnya akan mengetahui persoalan-persoalan yang dihadapi atau mungkin dihadapi sekolah dalam mencapai tujuan yang diinginkan sekolah.

Dengan demikian mereka dapat melihat secara jelas dimana mereka dapat berpartisipasi untuk membantu madrasah. Begitu pula, madrasah akan mengenal secara mendalam latar belakang, keinginan dan harapan-harapan masyarakat terhadap sekolah. Pengenalan harapan masyarakat dan orang tua murid terhadap sekolah, khususnya sekolah merupakan unsur penting guna menumbuhkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Apabila hal ini tercipta, maka sikap apatis, acuh tak acuh dan masa bodoh masyarakat akan hilang. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah sekolah mengenal harapan masyarakat? Atau sekarang justru sekolah memaksakan harapannya kepada masyarakat! Coba kita analisis kondisi tersebut berdasarkan pengalaman dan penglihatan selama ini dalam praktek penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Apabila kita belum melakukan hal tersebut, maka sudah saatnya mulai sekarang sekolah berbenah diri untuk membangun kemitraan dengan masyarakat/ stakeholders untuk kemajuan sekolah.

Prosedur Pelaksanaan Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat

Prosedur pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat dilaksanakan melalui tahapan berikut ini:

a. Menganalisis masyarakat

Kegiatan pertama dalam pelaksanaan manajemen peran serta masyarakat adalah menganalisis masyarakat yaitu yang berkaitan dengan sasaran masyarakat, kondisi, karakter, kebutuhan dan keinginan masyarakat akan pendidikan, problem yang dihadapi masyarakat serta aspek-aspek kehidupan masyarakat lainnya seperti kebiasaan, sikap, religius (fanatisme beragama) dan sebagainya. Hal ini sangat penting, karena pemahaman yang salah tentang kondisi masyarakat, akan menyebabkan program-program yang disusun dan dikembangkan oleh sekolah dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk pendidikan akan kurang tepat.

b. Mengadakan komunikasi

Tahap kedua dalam mengadakan hubungan sekolah dengan masyarakat adalah mengadakan komunikasi dengan masyarakat sasaran. Mengadakan komunikasi pada dasarnya menyampaikan informasi dan pesan dari pihak sekolah kepada masyarakat sasaran khususnya berkaitan dengan kemajuan (progress), program dan masalah (problem).

Keberhasilan komunikasi merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat (*skill ini communication is a key to successful team effort*). Artinya kalau anda ingin berhasil dalam memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, maka kunci pertama yang harus dikuasai adalah kemampuan berkomunikasi. Kembangkan kemampuan berkomunikasi secara baik, hal ini dapat dilakukan melalui latihan dan membiasakan berkomunikasi pada banyak orang.

c. Melibatkan Masyarakat

Melibatkan masyarakat bukan hanya sekedar menyampaikan pesan tapi lebih dari itu menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan dan program sekolah. Bagaimana teknik agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dapat anda pelajari pada bagian bab berikut tentang teknik hubungan sekolah dengan masyarakat di bawah ini.

Perlunya Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan

Di negara yang menjunjung tinggi demokrasi, diyakini bahwa pemerintahan di buat dari, oleh dan untuk rakyat. Kebijakan-kebijaksanaan negaranya, termasuk kebijaksanaan pendidikannya, sebagai bagian dari perangkat untuk menjalankan pemerintahan di Negara tersebut, juga berasal dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam kebijaksanaan pendidikan bukanlah jargon baru lagi, ia adalah satu keniscayaan.¹⁵

Selain alasan demokrasi, kebijaksanaan pendidikan tersebut secara konkrit dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat di bidang pendidikan. Rakyat lebih banyak tahu mengenai masalah mereka sendiri, dan bahkan juga banyak mengetahui bagaimana cara memecahkannya. Maka keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kebijaksanaan tersebut, justru memperkuat pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pelaksana formal.¹⁶

Masyarakat juga dipandang sebagai modal dasar pembangunan, yang jika digalakkan akan besar sumbangannya terhadap pembangunan yang di galakkan. Keterlibatan mereka dalam melaksanakan kebijaksanaan Negara,

¹⁵ Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 79.

¹⁶ Ibid.

termasuk kebijaksanaan pendidikannya, adalah manifestasi dari pemanfaatan dan pendayagunaan modal dasar pembangunan.

Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan, tidak saja sekedar dipandang sebagai loyalitas rakyat atas pemerintahannya, melainkan yang juga tak kalah penting adalah bahwa kebijaksanaan tersebut hendaknya dianggap oleh masyarakat sebagai miliknya. Dengan adanya perasaan memiliki terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan, masyarakat akan semakin banyak sumbangannya dalam pelaksanaan-pelaksanaan kebijaksanaan, termasuk kebijaksanaan pendidikannya.

Berdasarkan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang acuan pembentukan komite sekolah, maka komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah.

Dari uraian di atas bahwa peran komite sekolah sebagai jembatan antara *stakeholder*, wali murid, dan masyarakat dengan pihak satuan pendidikan sekolah sehingga perannya sangat vital dalam memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan di MTsN 2 Kota Kediri.

Komite Madrasah di MTsN 2 Kota Kediri secara garis besar berperan dalam melakukan kerjasama, menampung aspirasi masyarakat, dan memberikan masukan kepada Kepala Madrasah. Lebih rinci sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: (1) Melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; (2) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat untuk diusulkan kepada komite madrasah; (3) Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Madrasah mengenai: Kebijakan dan program pendidikan, RAPBM, Kriteria kinerja madrasah, Kriteria tenaga kependidikan, Kriteria fasilitas pendidikan, hal lain yang terkait dengan pendidikan; (4) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di MTs Negeri 2 Kota Kediri.¹⁷

Kesimpulan

Peran komite sekolah/madrasah MTsN 2 Kota Kediri dalam memberikan pertimbangan (*advisory agency*) kebijakan mutu dilakukan melalui: 1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam perencanaan mutu madrasah. MTsN 2 Kota Kediri selalu melibatkan Komite Madrasah dalam merencanakan mutu pendidikan. Baik mutu akademik maupun non

¹⁷ Dokumen Anggaran Rumah Tangga Komite MTsN 2 Kota Kediri, 2017.

akademik. Komite Madrasah sebagai representasi dari masyarakat, adalah pihak yang paling mengetahui apa-apa yang menjadi permasalahan mereka serta mengerti cara bagaimana mengatasi permasalahan mereka tersebut. Sehingga dalam hal perencanaan mutu madrasah, pihak madrasah senantiasa menerima aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui komite madrasah.

2. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam pelaksanaan mutu madrasah. Kebutuhan masyarakat terhadap sekolah/madrasah adalah penyelenggaraan dan pelayanan proses belajar mengajar dengan output yang berkualitas. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan mutu pendidikan di MTsN 2 Kota Kediri, Komite madrasah senantiasa terlibat dalam memberikan arahan, pertimbangan serta dukungan dalam kebijakan yang diambil.

3. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam evaluasi mutu madrasah. Komite madrasah MTsN 2 Kota Kediri ikut melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutu madrasah. Karena komite sebagai representasi masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Sehingga pada akhirnya, bukan hal yang asing bila kita seringkali mendengar semboyan “Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, dan masyarakat”.

Daftar Pustaka

- Dokumen Anggaran Rumah Tangga Komite MTsN 2 Kota Kediri, 2017.
- Dokumen MTsN 2 Kota Kediri, September 2018.
- Husen, Torten. Masyarakat Belajar, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 2, Hal. 264-268. Jakarta: Pusat AntarUniversitas, 2017.
- Imron, Ali. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Kep.Mendiknas No 44 tahun 2012 tentang Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah
- Pasal 8 Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Permendiknas No 44 Tahun 2012 tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah.
- Sulaiman Ibrahim, Pendidikan tentang Manusia dalam Perspektif Al-Qur'an, *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari*, Vol. 2, No. 2, 2017
- Suwarnaya, I Putu. *Manajemen Pendidikan*. Malang: Gunung Samudera, 2010.
- Tirtarahardja, Umar dan S.L.La Sulo, *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS*. Bandung: Citra Umbara, 2010.